

Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In (2017-2018)

Bara Bhiswara

Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga

Abstrak

Sebagai 'middle power' yang dikelilingi para 'major powers', kebijakan luar negeri Korea Selatan secara umum dibentuk oleh kepentingan untuk menjembatani relasi kekuatan yang muncul di kawasan. Kompetisi pengaruh dari Amerika Serikat dan Tiongkok, opsi kerjasama internasional, hingga provokasi militer Korea Utara di Semenanjung Korea menjadi dinamika isu geopolitik senantiasa memunculkan tantangan tersendiri bagi presiden Korea Selatan yang tengah menjabat. Menggunakan metode analisis konten, artikel ini berusaha mengidentifikasi bagaimana kode geopolitik Korea Selatan diartikulasikan dalam satu tahun masa kepresidenan Moon Jae-In. Berangkat dari sudut pandang geopolitik, pembahasan akan difokuskan dalam meninjau peta retorik Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan memosisikan dirinya di kawasan dan sistem internasional, dan bagaimana Korea Selatan mengidentifikasi kawan, lawan, dan menjustificasinya kepada audiens domestik dan internasional.

Kata-kata kunci: Korea Selatan, Middle Power, Kode Geopolitik, Kebijakan Luar Negeri, Semenanjung Korea

As a middle power that is surrounded by major powers, South Korea's foreign policies are generally established with the interest of bridging the emerging power relations in the region. The Competition of influence between the United States and China, the options of international cooperation, and the North Korean military provocation on the Korean Peninsula are the geopolitical dynamics that always pose a challenge for the running South Korean president. Using content analysis methods, this article seeks to identify how South Korea's geopolitical codes are articulated in one year of Moon Jae-In's presidency. Departing from a geopolitical standpoint, the discussion will focus on reviewing South Korea's rhetorical map, how South Korea is positioning itself in the region and the international system, and how South Korea identifies friends, opponents, and justifies them to domestic and international audiences.

Keywords: South Korea, Middle Power, Geopolitical Code, Foreign Policy, Korean Peninsula

Pendahuluan

Terletak di sebelah selatan Semenanjung Korea dan timur Daratan Asia, Korea Selatan merupakan salah satu negara *middle power* dengan lingkungan geopolitik yang rawan terhadap tubrukan kepentingan. Semenjak berdirinya sebagai satu negara, Korea Selatan berperan sebagai jembatan antara berbagai benua dan kekuatan-kekuatan maritim, menjadikannya subjek setiap ada transisi kekuatan di kawasan. Pertumbuhan Tiongkok yang sangat pesat berikut pola aktivitasnya yang semakin agresif kemudian memunculkan kekhawatiran besar pada Korea Selatan. Fenomena *Rising China* tersebut berkonsekuensi langsung terhadap intensifikasi kompetisi dan rivalitas Tiongkok dengan negara *great power* global saat ini, Amerika Serikat. Konsekuensinya, Korea Selatan terjebak dalam kompetisi kekuatan antara Amerika Serikat, aliansi militernya sejak 1953, dengan Tiongkok, partner ekonomi terbesarnya yang semakin menunjukkan ambisinya sebagai *great power*.

Aspek geopolitik berikut relasi kekuatan yang ada di dalamnya kemudian menuntut Korea Selatan untuk dapat bertindak secara strategis. Selama ini, Korea Selatan berupaya keras untuk dapat berperan sebagai 'penengah' dengan menekankan aspek seperti kooperasi dan dialog sekaligus menghindari adanya konflik dan ketegangan. Namun demikian, di abad ke-21, menjaga stabilitas dan keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi semakin sulit akibat meningkatnya agresivitas Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping dan ambiguitas kebijakan AS di bawah Donald Trump. Terpilihnya Moon Jae-in sebagai Presiden Korea Selatan pada tanggal 10 Mei 2017 memunculkan keingintahuan tentang bagaimana Moon akan memimpin Korea Selatan. Belum genap menjabat selama satu tahun sebagai Presiden, Moon menunjukkan adanya bentuk urgensi baru dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, salah satunya dalam memfasilitasi agenda pertemuan Inter-Korea, yang sebelumnya dilakukan oleh Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun, dan inisiatif untuk memperluas jangkauan kerjasama melalui *New Southern Policy* dan *New Northern Policy*. Berangkat dari keadaan tersebut, penulis mencoba mengurai kode geopolitik Korea Selatan dalam masa satu tahun pemerintahan Moon Jae-in berikut pemetaannya dalam kawasan dan sistem internasional.

Analisis Kode Geopolitik

Taylor dan Flint (2000) menjelaskan, kode geopolitik merujuk pada cara negara dalam mengorientasikan dirinya terhadap dunia. Pendefinisian terhadap kode geopolitik dapat diklasifikasikan ke dalam lima poin

utama. Pertama, kawan saat ini dan kawan potensial. Kedua, lawan saat ini dan lawan potensial. Ketiga, bagaimana mempertahankan kawan saat ini dan menjaga kawan potensial. Keempat, bagaimana menyikapi lawan saat ini dan ancaman yang tengah muncul. Kelima, bagaimana negara atau pemimpin menjustifikasi keempat kalkulasi kode geopolitik sebelumnya kepada publik domestik dan komunitas global.

Istilah kode mendenotasikan sesuatu yang bersifat teknis sekaligus aplikatif, namun sesuai dengan nilai populer dan objektif kebijakan luar negeri (Djikink 1998). Itulah mengapa justifikasi terhadap audiens menjadi variabel esensial yang mengikat kode geopolitik, dimana pemimpin suatu negara perlu meyakinkan bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan bersama. Gaddis (1982) menjelaskan bahwa kode geopolitik tersebut dapat berubah, bergantung pada asumsi terkait kepentingan dan ancaman terhadap suatu negara, dan pada pemerintahan tertentu dan situasi yang dipersepsikan tengah dihadapi. Itulah mengapa persepsi suatu pemerintahan terhadap kepentingan tertentu dapat mendorong proses terbentuknya kode geopolitik.

Dalam artikel ini, analisis kode geopolitik dilakukan melalui analisis data secara sistematis. Kelebihan dari sistem ini adalah analisis tidak diawali dengan suatu argumen kemudian dijustifikasi, melainkan simpulan analisis diambil dari data-data yang disajikan (Ambrosia dan Lange 2014). Pidato kepresidenan merupakan bentuk geopolitik praktis yang kemudian menjadi salah satu sumber utama dari analisis kode geopolitik. Pemilihan pidato kepresidenan sebagai sumber utama dari artikel ini dikarenakan pidato kepresidenan menunjukkan bagaimana pembuat kebijakan luar negeri mengartikulasi dan mengkodifikasi kultur geopolitik melalui produksi narasi geopolitik (O'Loughlin et al. 2005). Penulis akan berfokus pada tiga diskusi utama. Pertama yaitu terkait peta konseptual geografis Moon. Kedua, *positioning* Korea Selatan di kawasan dan sistem internasional. Ketiga, identifikasi kode geopolitik dari segi relasi kekuatan dan hubungan antar negara.

Peta Geografis Konseptual Korea Selatan

Rhetorical map atau pemetaan retorik oleh suatu negara ditunjukkan dari jangkauan geografis dari pidato-pidato presidensial, dengan melihat negara dan kawasan yang lebih banyak dijadikan referensi dibandingkan negara dan kawasan yang lain (Ambrosio dan Lange 2014). Pada pembahasan ini, penulis akan mengawali dengan pemetaan secara kuantitatif dan numerik berdasarkan pidato kepresidenan Moon, dilanjutkan dengan analisis kualitatif terhadap konteks dari simpulan yang diambil dari tinjauan sebelumnya. Perlu diingat bahwa persebaran tersebut tidak merata, dimana jumlah dicantumkannya suatu negara

antar pidato dapat sangat berbeda. Namun demikian, analisis ini dapat membantu melihat bagaimana *degree of emphasize* dan *scope* basis pemikiran geopolitik yang dimiliki seorang pembuat kebijakan terhadap suatu wilayah atau negara (Flint 2000). Berikut adalah lima besar negara dan wilayah yang digunakan sebagai referensi oleh Moon dalam 42 pidato presidensial yang dipublikasikan.

Tabel 1. Lima Besar Rujukan Negara dan Wilayah

Peringkat	Negara	Jumlah	Kawasan	Jumlah
1	Korea Utara	161	Semenanjung Korea	158
2	Amerika Serikat	81	Asia Timur Laut	56
3	Rusia	78	Eurasia	17
4	Jepang	42	Amerika Latin	9
5	Tiongkok	7	Asia Timur	8

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa pemetaan retorik dari pemikiran geopolitik Moon masih sangat didominasi di kawasan, dengan Korea Selatan sebagai peringkat pertama dari klasifikasi negara dan Semenanjung Korea dari klasifikasi kewilayahan. Penyebutan Korea Utara hampir selalu diikuti dengan diskusi terhadap Semenanjung Korea, dan dalam sebagian lain dalam pidato-pidato juga ditarik dalam konteks yang lebih luas, yakni di Asia Timur Laut. Hal yang menarik dari pemetaan di atas adalah posisi Rusia dan Eurasia di peringkat yang sama, yaitu peringkat tiga, mengalahkan negara tetangga Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, dan berada di atas kawasan Amerika latin dan Asia Timur. Namun demikian, perlu diperhatikan, meskipun memiliki jumlah yang bersaing dengan Amerika Serikat, *degree of emphasize* terhadap Rusia hanya berpusat pada beberapa pidato saja, sedangkan Amerika Serikat lebih merata, dimana Amerika Serikat muncul di dua puluh satu pidato kepresidenan sedangkan Rusia hanya muncul di tujuh pidato. Tingginya tingkat rujukan nama negara secara berkelanjutan menunjukkan bahwa negara tersebut berada di barisan depan pemikiran geopolitik seorang pembuat kebijakan (Ambrosio dan Lange 2014). Tiongkok sendiri hanya muncul sebanyak tujuh kali, berada di peringkat yang sama dengan Asia Timur.

Penulis menemukan, dari dua puluh enam pidato yang mencantumkan Amerika Serikat, sebanyak tiga puluh delapan kali konsep 'Aliansi ROK-US' muncul. Pola ini mengulang era pemerintahan Myung-bak yang bersifat Amerika-sentris dalam aspek keamanan. Hal yang membedakan

adalah, Moon tidak mengusung ide kerjasama keamanan trilateral antara Korea Selatan-Amerika Serikat-Jepang, seperti yang diungkapkan Myung-bak (Lee 2016). Penekanan terhadap penegakan aliansi ROK-US tersebut dinarasikan dalam dua isu utama. Pertama, terkait penyelesaian isu nuklir di Semenanjung Korea. Kedua, sebagai bentuk peningkatan kapabilitas pertahanan militer Korea Selatan. Kemunculan dua isu besar tersebut merupakan konsekuensi tantangan geopolitik yang dihadapi Korea Selatan semenjak Moon menjabat sebagai presiden. Meskipun keduanya merupakan tema yang telah menjadi permasalahan pemerintahan sebelumnya, namun di era Moon muncul intensifikasi masalah yang menuntut Moon untuk bersikap lebih tegas. Sebagai rekan kerjasama militer terbesar sekaligus terkuat, intensifikasi aliansi dengan Amerika Serikat dibutuhkan oleh Korea Selatan untuk menghadapi provokasi uji nuklir Korea Utara di tahun 2017.

Instalasi sistem pertahanan balistik *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) yang merupakan warisan dari pemerintahan Park Geun-hye kemudian muncul menjadi *epitome* dari kerjasama militer ROK-US yang dilanjutkan dalam kebijakan Moon. Aliansi ROK-US merupakan kunci dimana usaha *deterrent* melawan provokasi Korea Utara dikombinasikan dengan postur pertahanan yang baik dapat mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea (Moon 2017).

“Strong security is made possible with mighty defense capabilities. The Government will also strive to further enhance self-reliant defense capabilities. It will also lay the foundation for the resolution of the North Korean nuclear problem.” (Moon 2017).

“I will safeguard national security with the unwavering ROK-US alliance and the overwhelming national defense capability. We all are well-aware that peace is possible only when it is backed by strong and solid security.” (Moon 2017).

“The national defense reform is a mandate from the people, which cannot be delayed any longer. An intensive national defense reform is a responsibility to keep the people and homeland safe in the face of an especially grave security environment.” (Moon 2017).

“For the sake of peace on the Korean Peninsula, I will crisscross the globe. If needed, I will immediately fly to Washington. I will also visit Beijing and Tokyo and even Pyongyang under the right circumstances.” (Moon 2017).

Penekanan terhadap pentingnya pembangunan kekuatan nasional untuk mengamankan warga Korea Selatan dan mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea tersebut kemudian menjadi suatu bentuk justifikasi di mata audiens domestik dan internasional terkait kebijakan pertahanan Korea Selatan. Justifikasi terhadap audiens internasional

menjadi aspek penting, karena pasca Moon menjabat sebagai presiden, protes Tiongkok terhadap THAAD disuarakan secara konsisten lewat sekitar 50 pernyataan luar negeri hingga melalui sanksi ekonomi dan diplomatik informal (Meick dan Salidjanova 2017)

Dalam pidato inaugurasinya sebagai presiden, Moon menyebutkan “*The ROK-US alliance will be further strengthened. In the meantime, I will have serious discussions with the United States and China for the resolution of issues related to THAAD,*” (Moon 2017). Sementara ide mengenai penguatan aliansi ROK-US ditekankan, tidak satupun dari tujuh narasi yang ada mereferensikan Tiongkok sebagai sasaran justifikasinya secara eksplisit. Meskipun muncul banyak perdebatan terhadap bagaimana *rapprochement* yang terjadi antara Tiongkok dan Korea Selatan di tahun 2018 terwujud, Moon sejauh ini telah menyikapi tensi yang muncul dalam hubungan dengan Tiongkok secara konsisten melalui penekanan aspek terhadap keamanan nasional dan perdamaian Semenanjung Korea. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk *balanced diplomacy* dari Korea Selatan, dimana Korea Selatan berusaha untuk mengakomodasi kepentingan partnernya tanpa perlu mengantagoniskan salah satunya. Pola ini juga diterapkan oleh Park Geun-hye sebelum ia memantik kontroversi dengan meresmikan THAAD menjelang *impeachment*.

Penegasan Moon sendiri akan penguatan aliansi ROK-US pada dasarnya telah menunjukkan bahwa tidak ada revisi kebijakan luar negeri. Namun disini, Korea Selatan juga bersikap *balanced* dengan meyakinkan Tiongkok akan *three nos*, dimana Korea Selatan sepakat untuk tidak menambah instalasi THAAD di negaranya, tidak terlibat dalam kerangka kerjasama sistem pertahanan misil yang dipimpin Amerika Serikat, dan untuk tidak terlibat dalam aliansi trilateral AS-Jepang-Korea Selatan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (Glasser dan Collins 2017). Bagaimanapun juga, Tiongkok merupakan negara tetangga Korea Selatan dari 2000 tahun yang lalu dan masih akan menjadi tetangga Korea Selatan 2000 tahun yang akan datang. Upaya Moon untuk melanjutkan *balanced diplomacy* adalah bentuk akomodasi kepentingan yang selama ini menjadi kunci stabilitas negara Korea Selatan dalam menjalin hubungan dengan *great powers*.

Menyusul di peringkat tiga, tema utama dari rujukan Moon terhadap Rusia direfleksikan dari insiatif Moon dalam memperkenalkan kerjasama *New Northern Policy*, yang ditujukan untuk negara Rusia dan negara-negara Eurasia. Seperti yang dikatakan Moon, “*Korea is not just part of East Asia, but the starting point in the path toward Eurasia.*” (Moon 2017). *New Northern Policy* sendiri disusun Moon untuk menyinergikan kerangka kerjasamanya dengan *New East Policy* yang diinisiasi Putin untuk mengembangkan *Russian Far East*.

“The point where the New Northern Policy and the New East Policy meet is the Russian Far East.” (Moon 2017).

“Korea is the optimal partner in the development of the Russian Far East being pushed by the Russian Government. Korea’s New Northern Policy is also predicated on cooperation with Russia.” (Moon 2017).

Adanya sanksi ekonomi dan diplomatik Tiongkok dengan menutup 50 perusahaan Korea Selatan menjadikan diversifikasi hubungan dagang menjadi suatu kebutuhan. Meskipun kini Tiongkok dan Korea Selatan telah melakukan upaya normalisasi hubungan, Korea Selatan telah menerima pengalaman bagaimana cara Tiongkok memainkan *economic leverage* yang dimiliki memiliki dampak yang besar terhadap stabilitas ekonomi negara. Apabila ditinjau pada konteks yang lebih jauh dari pidato yang disampaikan, diversifikasi hubungan dagang Korea Selatan juga diperluas oleh Moon pada negara-negara seperti Vietnam, Dubai, dan Filipina (Hani.co.kr 2017).

Tema besar dari pidato yang merujuk Jepang sendiri bertemakan isu historis terkait era kolonialisme dan imperialisme Jepang. Insiden perbudakan seksual atau *comfort women* di tahun 1910-1945 dipermasalahkan oleh Moon karena menyangkan Jepang yang menutup kasus tersebut “*with just a word*” (Moon 2017). Pengakuan historis, menurut Moon, tidak dapat diubah menyesuaikan situasi politik domestik Jepang, melainkan diresolusi melalui prinsip internasional yang mencakup restorasi kehormatan korban, kompensasi, klarifikasi realita, dan janji untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama, serta sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konsensus nasional (Moon 2017). Penolakan Jepang terhadap hak Korea Selatan atas Kepulauan Dokdo juga kemudian dinilai memuat visi imperialis (Moon 2017).

Namun demikian, Moon juga menyebutkan bahwa isu historis, meski tidak diabaikan, tidak dijadikan hambatan untuk memperkuat kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan. Moon berharap Korea dan Jepang dapat menjadi partner yang memahami satu sama lain dan mengarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan negara bersama (Moon 2017). Moon juga mengatakan bahwa sebagai negara tetangga dengan lokasi geografis terdekat, Jepang dan Korea Selatan diharapkan dapat menyongsong masa depan bersama berdasarkan rekonsiliasi dan refleksi diri (Moon 2017).

Tiongkok sendiri, meskipun merupakan partner dagang terbesar Korea Selatan, berada di peringkat terbawah dengan tujuh referensi. Dalam pidato inaugurasinya, Moon menyebutkan, “*I remain committed to doing all I can for the settlement of peace on the Korean Peninsula. The ROK-US alliance will be further strengthened. In the meantime, I will*

have serious discussions with the United States and China for the resolution of issues related to THAAD.” (Moon 2017). Setelah pidato tersebut, tak ada konteks yang bersifat primer, baik yang membahas isu THAAD maupun isu lainnya. Korea Selatan sendiri, meskipun kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok, dihadapkan pada kontroversi instalasi THAAD, tidak melibatkan Tiongkok secara eksplisit sebagai audien. Tiongkok hanya dilibatkan dalam justifikasi Moon kepada audiens domestik dan internasional bahwa instalasi THAAD merupakan upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan untuk memperkuat gestur pertahanan negara guna melindungi rakyat dari ancaman nuklir.

***Middle Powership* dan Peran Korea Selatan dalam Sistem Internasional**

Konsep *middle power*¹ selama lebih dari satu dekade telah menjadi karakteristik dari narasi diplomatik Korea Selatan. Namun demikian, pada praktiknya, eksekusi dari diplomasi *middle power* tersebut tidaklah konsisten antar pemerintahan yang menjabat di Korea Selatan, baik dalam aspek gambaran, intensi, dan kebijakan (Kim 2016). Kajian terhadap Kode geopolitik Moon Jae-In dalam satu tahun pidato kepresidenan terkait konsep *middle powership* kemudian memperkuat argument terhadap dinamika pendefinisian terhadap konsep tersebut. Apabila hasil kajian disandingkan dengan penelitian milik Kim (2016) terkait pendefinisian *middle powership* di era Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak, dan Park Geun-hye, maka akan didapat analisis sebagai berikut:

Tabel 2. Konsep *middle power* dalam diskursus kebijakan Korea Selatan

	Roh Moo-Hyun (2003-08)	Lee Myung-bak (2008-13)	Park Geun-hye (2013-2017)	Moon Jae-in (2017-sekarang)
Ideologi	Progresif	Konservatif	Konservatif	Progresif
Fokus konseptual geografis	Regional	Global	<i>Rethinking China</i>	Regional dan Global

¹ *Middle power* sendiri merujuk pada peringkat relatif suatu negara dalam hierarki sistem internasional, terletak di bawah *great power* dan di atas *minor power*, berdasarkan aspek kapabilitas, kekayaan, kapasitas dan reputasi diplomatic, stabilitas domestic, hingga aset *hard power* (Schwler, 2017). Selengkapnya: Schwler, Randall, 2017. “The Concept of Middle Power”. Tersedia di: <https://mershoncenter.osu.edu/media/media/publications/cvs/SchwellerR-cv17.pdf>

	Roh Moo-Hyun (2003-08)	Lee Myung-bak (2008-13)	Park Geun-hye (2013-2017)	Moon Jae-in (2017-sekarang)
<i>Self-identity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hub Asia Timur Laut • Penyeimbangan Jepang-Tiongkok • Fasilitator kooperasi regional (NAI) 	‘Global Korea’ Middle Power Anggota G20, OECD, dan DCA Jembatan negara kaya dan miskin Menghormati masyarakat global	Enggan mempromosikan identitas <i>Middle Power</i> , kecuali dalam MIKTA	<i>Responsible Middle Power</i> Anggota G20, OECD, dan FEALAC <i>Security hub</i> di Asia Timur Laut
Area aplikasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama ekonomi • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama ekonomi • Perubahan Iklim • Pembangunan internasional 	Pembangunan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama ekonomi • Terorisme • Pembangunan internasional • Kerjasama keamanan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi ketergantungan pada aliansi US-ROK • Mengejar arsitektur keamanan Asia Timur Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • AS-sentris • Kerjasama keamanan AS-Jepang-Korea 	<i>Balanced Diplomacy</i> antara US-Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandalkan AS • <i>Balanced Diplomacy</i> Tiongkok-AS • Menyanggah kerjasama AS-Jepang-Korea

“As a responsible middle power that rose from the tragedy of war and has achieved economic development and democratization, Korea intends to make active contributions to world peace and stability.” (Moon 2017).

“As a middle power standing tall in the international community, the Korean government was able to announce the New Northern Policy and the New Southern Policy. I was also able to continue to stress the need for dialogue in inter-Korean relations.” (Moon 2018).

Dalam pernyataan tersebut, Moon mendefinisikan diri Korea Selatan sebagai *responsible middle power*. Konsep ini merujuk pada peranan *middle powership* dalam skala global, baik sebagai pemimpin, aktivis, atau perumus agenda (Lee 2016). Dalam pemerintahan sebelumnya, identitas tersebut dipromosikan oleh pemerintahan Park Geun-hye melalui slogan “*responsible middle power contributing to world peace*

and prosperity”. Promosi tersebut ditunjukkan dengan inisiatif Park Geun-hye dalam MIKTA di tahun 2013. Namun demikian, keterlibatan dalam MIKTA belum cukup untuk menyebut dirinya sebagai *responsible middle power*. Dalam satu tahun masa kepresidenannya, Moon menunjukkan intensi yang diiringi dengan aksi dalam memperkuat identitas Korea Selatan sebagai *responsible middle power*. Dalam pembahasan sebelumnya, OECD, G20, FEALAC, AIIB, dan WHO muncul menjadi *platform* dalam diskursus pernyataan presidensial. Bentuk inisiatif atau partisipasi Moon dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Korea Selatan sebagai *Responsible Middle Power*.

Platform	Tahun	Inisiatif/Partisipasi
G20	2017	Memperluas bantuan kemanusiaan terhadap negara terdampak isu terorisme Mendukung peningkatan kapabilitas <i>Financial Action Task</i> Mengusulkan pembentukan <i>global financial safety net</i>
ASEAN	2017	Memperkenalkan inisiatif kerjasama <i>New Southern Policy</i> kepada negara-negara ASEAN untuk memperdalam kerjasama ROK-ASEAN Mendorong ASEAN sebagai komunitas yang berfokus pada <i>Three Ps: People, Prosperity, Peace</i> .
FEALAC	2017	Mempromosikan inisiatif sinergi <i>New Southern Policy</i> dengan <i>New Northern Policy</i> yang mencakup Rusia dan negara-negara Eruasia
AIIB	2017	Komitmen partisipasi aktif dan mengenalkan <i>action plan</i> untuk meningkatkan rasio produksi energi melalui sumber terbarukan hingga 20%
WHO	2017	Komitmen implementasi Paris Agreement dan memperkenalkan rencana anggaran 100 juta dollar bantuan kemanusiaan untuk 13 negara berkembang 2020.
MERCOSUR	2018	Menandatangani <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> dengan lima negara Amerika Tengah, yakni Panama, Costa Rica, Honduras, El Salvador.

Dalam upaya perwujudan identitas tersebut, Moon membawa pola yang serupa dengan Lee Myung-bak melalui keterlibatan aktifnya dalam berbagai platform internasional. Penekanan Moon terhadap identitas *responsible middle power* tersebut pada dasarnya bersifat krusial dalam percaturan hubungan internasional. Dengan semakin diakuinya Korea

Selatan sebagai *middle power*, maka legitimasi Korea Selatan sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang semakin meningkat dan berdampak pada meningkatnya kapasitas dan kapabilitas diplomatik Korea Selatan. Salah satu refleksi praktis dari nilai strategis tersebut dapat dilihat dari kebijakan *New Northern Policy* dan *New Southern Policy* yang juga dipromosikan kepada negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan Eurasia dan melibatkan mereka dalam kerangka kerja bersama *major powers* seperti Tiongkok dan Rusia.

Dalam setiap narasi yang dikembangkan, Moon selalu menekankan aspek-aspek seperti kerjasama internasional sebagai kunci dari pembangunan dan perdamaian dunia. Namun demikian, Asia Timur Laut dan Semenanjung Korea masih menjadi fokus konseptual utama yang muncul dalam diskursus. Adanya inisiatif baru seperti *New Southern Policy*, *New Northern Policy*, dan komitmen di berbagai *platform* organisasi internasional dan regional memang dibutuhkan untuk memperkuat identitas Korea Selatan sebagai *responsible middle power*, namun isu di kawasan masih menjadi medan geopolitik utama dari kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Dalam aspek kerjasama keamanan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, *middle powermanship* Korea Selatan di era Moon menekankan pada aliansi ROK-US, meskipun senantiasa diimbangi dengan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Berbeda dengan Lee Myung-bak, Moon menegaskan adanya ide kerjasama trilateral keamanan antara AS-Korea Selatan-Jepang. Meskipun belum terjawab mengapa hal tersebut secara tegas dinegasikan oleh Korea Selatan, namun pernyataan tersebut bertepatan dengan bentuk pemberian jaminan *three nos* kepada Tiongkok yang khawatir terhadap munculnya aliansi trilateral di kawasan. Selain itu, kerjasama tersebut sejalan dengan penekanan Moon terhadap *greater alliance* antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta berdirinya Korea Selatan sebagai *security hub* di Asia Timur Laut (Moon 2017).

Relasi Kekuatan dan Situasi Geopolitik Korea Selatan

Berangkat dari penjabaran di atas dan analisis terhadap pidato kepresidenan Moon Jae-in, dapat dilakukan identifikasi kode geopolitik seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3. Identifikasi kode geopolitik Korea Selatan, model Taylor dan Flint (2000).

Kode Geopolitik	Aktor	Sikap	Justifikasi
Kawan	AS	-Memperkuat aliansi ROK-US melalui kerjasama pertahanan militer dan diplomasi dengan Presiden Trump	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea • Melindungi keamanan masyarakat Korea Selatan
	Tiongkok	-Inisiatif melakukan upaya normalisasi hubungan bilateral -Salah satu pilar keamanan Semenanjung Korea	THAAD ditujukan untuk melindungi warga Korea Selatan
	Rusia	-Partner utama dalam <i>New Northern Policy</i>	Korea Selatan sebagai <i>responsible middle power</i> dan bagian dari Eurasia
	Jepang	-Anggota <i>Six Party Talks</i> -Elemen penting dalam stabilitas Semenanjung Korea melalui perbaikan hubungan Jepang-Korea Utara -Mendorong kerangka kerjasama bilateral Korea	-Tetangga terdekat Korea Selatan -Memiliki kedekatan historis dan kultural yang kuat

		Selatan-Jepang lebih jauh	
Kawan Potensial	Korea Utara	-Membuka ruang untuk dialog dan negosiasi -Menawarkan kerangka kerja ekonomi apabila denuklirisasi terwujud	-Korea Selatan menginginkan unifikasi Korea yang tidak tergesa-gesa dan damai -Kooperasi Korea Utara dapat memunculkan perdamaian -Denuklirisasi membuka pintu terhadap kerjasama dan kesejahteraan dua negara
Lawan	Korea Utara	-Mendorong AS untuk menghindari <i>strategic patience</i> dalam resolusi - Mengecam proyek nuklir Korea Utara dan mengonfrontasinya dengan THAAD dan <i>joint military exercise</i>	-Mengganggu perdamaian Semenanjung Korea dan dunia internasional
Lawan/ Ancaman potensial	Korea Utara	-mengancam akan kembali menekan dan memberikan sanksi ekonomi apabila proyek nuklir berlanjut dan tidak akan menjamin keamanan Korea Utara	-Tekanan dan sanksi ekonomi merupakan bagian dari instrumen diplomasi -Keamanan masyarakat Korea Selatan dan perdamaian semenanjung

			sebagai prioritas
	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> -Menuntut Jepang lebih bertanggung jawab terkait isu perbudakan seksual -Mengecam klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo -Menyebut Jepang memiliki visi imperialis (Terkait kasus Pulau Dokdo) 	<ul style="list-style-type: none"> -Banyak korban perbudakan masih butuh pertanggungja waban -Pulau Dokdo secara legal merupakan hak Korea Selatan

Berdasarkan dari identifikasi kode geopolitik yang telah dilakukan, Korea Utara menduduki posisi yang paling unik dimana Korea Utara dalam retorika Moon Jae-in tidak hanya dipandang sebatas sebagai lawan, melainkan juga kawan potensial dan ‘lawan potensial’. Sementara ancaman nuklir menjadi faktor utama yang menjadikan Korea Utara lawan dari Korea Selatan, Korea Selatan masih membuka lebar ruang untuk dialog terkait denuklirisasi. Namun demikian, Korea Selatan juga cukup percaya diri dengan mengatakan bahwa tindakan militer dan sanksi ekonomi akan diberikan apabila Korea Utara tidak menghentikan provokasi nuklirnya (Moon 2017). Hal ini sekaligus membedakan Moon dari Kim Dae-Jung, pendahulunya, dimana opsi resolusi konflik tidak hanya terbatas pada diplomasi konvensional, namun tekanan dan sanksi ekonomi juga banyak ditekankan sebagai instrumen diplomasi.

“...Korea and the United States agreed on the overall direction that sanctions are a diplomatic tool and the denuclearization of the Korean Peninsula should be achieved in a peaceful manner.” (Moon 2017).

“If North Korea does not stop its nuclear provocations, there is no other choice but to further strengthen sanctions and pressure. Peace on the Korean Peninsula and North Korea’s security will not be guaranteed.” (Moon 2017).

Di sisi yang lain, Korea Utara juga dipandang sebagai kawan potensial. Korea Selatan, seperti yang diungkapkan Moon, tidak

menginginkan kejatuhan Korea Utara. Unifikasi terhadap dua negara perlu dilakukan secara damai dan demokratis (Moon 2017). Untuk itu, Korea Selatan menjamin akan menginstitutionalisasi perjanjian melalui voting dalam Majelis Nasional, sehingga kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak akan berganti meskipun Moon tidak lagi menjabat sebagai presiden. Moon juga menjanjikan akan membuat *new economic map* apabila Korea Utara menunjukkan kemajuan dalam perwujudan stabilitas di Semenanjung Korea (Moon 2017).

Dari awal pidato inagurasinya, Moon menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat Korea Selatan menjadi prioritas utama selama Moon menjabat sebagai presiden (Moon 2017). Hal tersebut ditunjukkan melalui perbaikan gestur pertahanan militer negaranya, salah satunya dengan kerjasama instalasi sistem pertahanan THAAD dengan AS. Instalasi THAAD disebut Moon (2017) bersifat esensial sebagai *deterrent* yang dapat mendorong Korea Utara menghentikan atau menunda proyek nuklirnya. Ide Korea Selatan sebagai *security hub* di Asia Timur Laut dan sebagai *responsible middle power* memerlukan Moon untuk mengambil posisi yang lebih kuat dalam resolusi konflik. *“This is the reason why I made clear at every chance that the Republic of Korea must be the country that takes the helm in addressing matters concerning the Korean Peninsula”* (Moon 2017). Moon (2017) juga mengungkapkan, *“it is none other than the North Korean nuclear and missile issue, a threat that is already spreading beyond the boundaries of the Korean Peninsula and heading towards the United States,”*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ketidakamanan AS dari provokasi nuklir Korea Utara termasuk dalam pemikiran geopolitik keamanan Moon di kawasan. Intensifikasi aliansi ROK-US kemudian menyertai hampir setiap pernyataan Moon terkait isu nuklir di Semenanjung Korea.

Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa medan geopolitik Korea Selatan masih dimainkan oleh aktor-aktor utama di kawasan, yakni Korea Utara, Tiongkok, Jepang, dan aliansi Korea Selatan, AS. Dalam peta retorik Moon, Rusia muncul menyaingi Tiongkok menunjukkan adanya upaya perluasan jangkauan pemikiran geopolitik Korea Selatan. Hal tersebut menyusul dari kebutuhan Korea Selatan untuk menyiasati agresivitas Tiongkok sekaligus memperkuat identitasnya sebagai *responsible middle power*. Bukan hanya Rusia, Moon juga menyorot ASEAN, G20, OECD, hingga FEALAC sebagai bagian dari fokus kebijakan luar

negeri, ditandai dengan berbagai agenda dan inisiatif yang dicanangkan.

Identifikasi kode geopolitik terhadap relasi kekuatan Korea Selatan dengan AS dan negara-negara di kawasan juga menunjukkan adanya pola baru dari para pendahulunya, terutama dalam menyikapi Korea Utara. Moon lebih menunjukkan sikap asertif dengan intensifikasi aliansi ROK-US, baik secara retorik maupun praktis. Bukan hanya itu, Moon juga percaya diri dapat menjadi *security hub* yang perlu memegang komando terhadap resolusi damai di Semenanjung Korea. Hal tersebut sejalan dengan komitmennya pada pidato inagurasi. Apabila Korea Selatan tidak muncul sebagai pemain yang dominan, baik dalam isu Semenanjung Korea maupun sebagai *middle power*, tinggal menunggu waktu sejauh mana Korea Selatan dapat bertahan di tengah gempuran persaingan *major powers* dan provokasi militer.

Sejauh ini, diversifikasi kerjasama yang diinisiasi Moon ke berbagai negara dan platform internasional, inisiatif partisipasi aktif Korea Selatan dalam berbagai isu internasional, *rapprochement* dengan Tiongkok dengan tetap mempertahankan instalasi THAAD, hingga partisipasi aktif Korea Selatan dalam mewujudkan resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui berbagai bentuk diplomasi merupakan produk-produk pemikiran geopolitik Moon. Apakah upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan Korea Selatan sebagai *established middle power* atau *security hub* di Asia Timur Laut masih akan memerlukan pengukuran dan analisis yang lebih lanjut dan waktu observasi yang lebih lama. Meskipun analisis hanya dilakukan terhadap satu tahu masa kepresidenan Moon, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman awal terhadap bagaimana Moon mengidentifikasi relasi kekuatan sekaligus memposisikan dirinya di dunia internasional. Adanya fenomena baru seperti *peace talk* antara Korea Selatan dan AS juga mendorong penulis untuk mengundang analisis lebih lanjut bagaimana Moon memodulasikan spektrum kode geopolitiknya sehingga penguraian terhadap kode geopolitik dapat melibatkan lebih banyak variabel kejadian dan rentang waktu untuk menghasilkan pemetaan analisis kode geopolitik yang lebih komplit.

Daftar Pustaka

Buku atau Artikel dalam Buku

Flint, C., 2006. "Geopolitical Codes: Agents Define Their Geopolitical Options" dan "Representations of Geopolitical Codes", dalam *Introduction to Geopolitics*. Oxon: Routledge

Artikel Jurnal

- Ambrosio, Thomas dan William A. Lange, 2014. "Mapping Kazakhstan's Geopolitical Code: An Analysis of Nazarbayev's Presidential Addresses, 1997-2014", *Eurasian Geography and Economics* 2014.
- Dijkink, G., 1998. "Geopolitical Codes and Popular Representations", *GeoJournal*, (46).
- Flint, C *et al.*, 2009. "Mapping the Dynamism of the United States' Geopolitical Code: The Geography of the State of the Union Speeches, 1998-2008", *Eurasian Geography and Economics*, (55).
- Kim, Sung-Mi, 2016. "South Korea's Middle-Power Diplomacy: Changes and Challenges", *Chatham House The Royal Institute of International Affairs* [daring]. Tersedia dalam <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-06-22-south-korea-middle-power-kim.pdf> (Diakses pada 13 Juni 2018).
- Lee, Kyung Suk, 2016. "New Approach of South Korea's Middle Power Diplomacy: Focusing on Global Agenda Setting", *Global Politics Review*, 2 (2).

Artikel Online

- Gill, Stephan., 2012. "China's Soft Balancing Strategy and the Role of Resource Investment" [daring]. Tersedia dalam <https://pdfs.semanticscholar.org/a38f/793fcbf87595881bd8fa8d34290d95b95f64.pdf> [Diakses pada 13 Juni 2018].
- Glaser, Bonnie S dan Lisa Collins, 2017. "China's Reapproachment With South Korea", *Foreign Affairs* [daring]. Tersedia di: <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-07/chinas-rapprochement-south-korea>.
- Hani.co.kr., 2018. "South Korean companies look to Southeast Asia in bid to increase exports" [daring]. Tersedia dalam <http://english.hani.co.kr/arti/english%20edition/e%20business/834409.html>.
- Hwang, Balbina Y., 2017. "The Limitations of "Global Korea's" Middle Power", *The Asan Forum* [daring]. Tersedia di: <http://www.theasanforum.org/the-limitations-of-global-koreas-middle-power/>.
- Meick, Ethan dan Nargiza Salidjanova, 2017. "China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and Implications", *U.S.-China Economic and Security Review Commission*. Tersedia dalam <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report%20China%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20and%20its%20Implications.pdf>.
- Schwler, Randall. 2017. "The Concept of Middle Power", Ohio University. Tersedia di:

<https://mershoncenter.osu.edu/media/media/publications/cvs/SchwellerR-cv17.pdf> [Diakses pada 14 Juni 2018].

Yonhapnews.co.kr., 2018. "New Northern Policy seeks to contribute to peace on Korean

Peninsula," [daring]. Tersedia dalam

<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/03/19/0200000000AEN20180319006600320.html>.

Appendix 1. Tanggal Pernyataan Presidensial Moon Jae-In

2017 - 10 Mei 2017
2017 - 06 Juni 2017
2017 - 12 Juni 2017
2017 - 16 Juni 2017
2017 - 20 Juni 2017
2017 - 23 Juni 2017
2017 - 24 Juni 2017
2017 - 27 Juni 2017
2017 - 28 Juni 2017
2017 - 30 Juni 2018
2017 - 06 Juli 2017
2017a - 07 Juli 2017
2017b - 07 Juli 2017
2017 - 08 Juli 2017
2017 - 12 Agustus 2017
2017 - 31 Agustus 2017
2017 - 07 September 2017
2017 - 19 September 2017
2017a - 20 September 2017
2017b - 20 September 2018
2017 - 21 September 2017
2017 - 26 September 2017
2017 - 27 September 2017
2017 - 28 September 2017
2017 - 17 Oktober 2017
2017 - 1 November 2017
2018 - 01 Januari 2018
2018 - 10 Januari 2018
2018 - 09 Februari 2018
2018 - 12 Februari 2018
2018 - 01 Maret 2018
2018 - 09 Maret 2018
2018 - 03 April 2018
2018a - 27 April 2018
2018b - 27 April 2018
2018 - 01 Mei 2018
2018 - 09 Mei 2018
2018 - 10 Mei 2018
2018 - 14 Mei 2018
2018 - 18 Mei 2018
2018 - 27 Mei 2018